

BOOK REVIEW

FAIR TRADE FOR ALL HOW TRADE CAN PROMOTE DEVELOPMENT

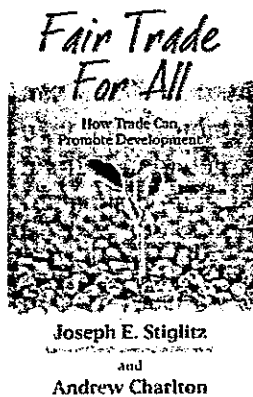
Penulis : Joseph E. Stiglitz dan Andrew Charlton

Penerbit : Oxford University Press

Tahun Terbit : 2005

ISBN : 0-19-929090-3

Peresensi : M. Ajisatria Suleiman



Bagaimana negara-negara miskin di dunia dapat dibantu untuk membantu diri mereka sendiri meraih kesejahteraan melalui perdagangan yang lebih bebas, namun lebih adil?

Berbagai putaran dari perundingan perdagangan internasional yang dilakukan selama ini ternyata menghasilkan kesepakatan yang hanya menguntungkan negara kaya dan meninggalkan negara berkembang dengan rasa frustrasi. Dalam buku yang kontroversial ini, ekonom pemenang Nobel Joseph E. Stiglitz bersama peneliti Andrew Charlton mengajukan suatu gagasan model ekonomi baru yang cukup radikal untuk menjawab tantangan dalam menyusun pembukaan pasar dan liberalisasi yang menguntungkan semua pihak dalam era globalisasi. Tantangan yang menjadi perhatian seluruh pemimpin di dunia saat ini dijawab dengan mengajukan model ekonomi yang meskipun radikal, namun realistis dalam mengelola hubungan perdagangan antara negara maju (kaya) dengan negara berkembang (miskin). Ide kedua penulis ini menggunakan pendekatan yang dirancang untuk membuka pasar

atas dasar kepentingan seluruh pihak, tidak hanya kekuatan ekonomi besar, untuk memastikan bahwa perdagangan dapat memacu pembangunan dan meminimalisasi biaya penyesuaian (*cost of adjustment*). Dilengkapi dengan analisis statistika dan bukti empiris yang memadai, buku ini sangat layak dibaca oleh mereka yang tertarik dengan isu perdagangan dan pembangunan.

Buku ini ditulis dalam suasana global yang dapat dikatakan 'sangat pesimis,' yakni menjelang Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-6 di Hong Kong pada 2005. KTM ini merupakan KTM pertama setelah KTM ke-5 yang diadakan di Cancun pada 2003 yang berujung pada kegagalan setelah KTM sebelumnya di Doha pada 2001 meluncurkan gagasan ambisius bernama Putaran Pembangunan. Ide untuk menyeimbangkan kepentingan negara maju dan negara berkembang, misalnya pada sektor pertanian, dan keseimbangan tarif, menjadi fokus perhatian dalam putaran-putaran perundingan WTO selanjutnya. Target yang hendak dicapai pun juga sebenarnya sudah jelas, *Millenium Development Goals* (MDGs), yang menjadi agenda bersama negara-negara di dunia dan dideklarasikan pada awal milenium ketiga. Namun, tantangan selanjutnya adalah merumuskan seperangkat target dan tujuan tersebut menjadi regulasi perdagangan internasional yang disepakati dan menguntungkan seluruh negara.

Ide dasar yang digagas dalam buku ini tegas, yaitu perdagangan merupakan kekuatan positif untuk memacu pembangunan. Dalam situasi dan regulasi yang tepat, kebijakan pengurangan tarif dan hambatan-hambatan terhadap pergerakan arus barang dan jasa dapat memfasilitasi perdagangan antarnegara dan pada akhirnya memberikan keuntungan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, tantangan berikutnya adalah menyusun kebijakan perdagangan yang tepat agar negara berkembang dapat terlibat lebih jauh dalam sistem perdagangan multilateral sehingga negara tersebut dapat memperoleh keuntungan dari partisipasi mereka.

Buku ini diawali dengan penjabaran beberapa alasan mengapa Putaran Doha dianggap belum menghasilkan harapan-harapan pembangunan yang dimandatkan kepadanya. *Pertama,*

perkembangan yang menyangkut kepentingan negara berkembang tidak berjalan lancar. Fokus negara berkembang adalah menyangkut tarif atas produk yang merupakan unggulan ekspor mereka, misalnya produk padat-karya (*labor-intensive goods*), yaitu produk yang dapat dihasilkan murah di negara yang memiliki upah minimum yang rendah dan membutuhkan tenaga kerja tidak terlatih (*unskilled labour*). Kedua, isu yang diusung oleh negara maju masih berorientasi kepada kepentingan mereka, yakni isu yang menjadi keputusan KTM di Singapura pada 1996. Isu yang diberi istilah 'Singapore Issues' ini, terkait investasi, kompetisi, transparansi pengadaan barang dan jasa, serta fasilitasi perdagangan dianggap hanya menguntungkan negara maju. Negara berkembang menentang isu ini karena mengekang kebebasan domestik dan memiliki biaya implementasi yang tinggi. Tidak sampai dua tahun sejak diluncurkan, Putaran Pembangunan nyaris berujung pada kegagalan. Namun, perundingan multilateral memang merupakan jalan terbaik untuk mengakomodasi kepentingan perdagangan karena kesepakatan yang diraih melalui perjanjian perdagangan bilateral justru melemahkan posisi tawar negara berkembang. Hal ini pun disadari oleh negara berkembang.

Buku ini kemudian meninjau ke belakang mengenai asal dari sengketa antara negara maju dan negara berkembang. Buku ini mencoba memberikan makna sebenarnya mengenai apa yang dimaksud dengan 'Putaran Pembangunan': suatu putaran yang menghasilkan perjanjian berdasarkan prinsip ekonomi dan keadilan sosial- bukan atas kepentingan segelintir pihak.

Bab II buku ini kemudian membahas pondasi konseptual dari rekomendasi yang hendak digagas. Dimulai dari hipotesa teoritis bahwa liberalisasi perdagangan, secara umum, meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian, pengalaman empiris di beberapa negara justru menunjukkan sebaliknya: kemiskinan, ketidakmerataan, dan risiko liberalisasi pasar modal tidak sesuai dengan asumsi yang diharapkan model ekonomi neoklasik. Permasalahan dalam liberalisasi pada negara berkembang adalah bahwa masih banyak sumber daya yang tidak terpakai, misalnya tenaga kerja pengangguran atau SDM yang belum terdidik. Dengan

demikian, untuk membuat suatu sektor lebih kompetitif tidak dibutuhkan peralihan sumber daya dari sektor lain melalui liberalisasi, melainkan cukup dengan mendayagunakan sumber daya yang tidak terpakai tersebut. Dengan kata lain, liberalisasi bukan merupakan suatu keharusan bagi negara berkembang. Hal ini ditambah dengan biaya penyesuaian yang timbul akibat peralihan sumber daya tersebut, yakni sumber daya yang dialihkan belum tentu diserap sepenuhnya ke dalam sektor yang baru sehingga hal ini akan menambah sumber daya yang tidak terpakai.

Bab III membahas mengenai kebutuhan akan Putaran Pembangunan dengan menganalisis pengalaman negara berkembang pada putaran-putaran perdagangan sebelumnya dan membahas singkat mengenai potensi keuntungan yang dapat dicapai dari liberalisasi lebih lanjut. Bab IV membahas mengenai perkembangan Putaran Doha sejauh ini dan bagaimana harapan negara berkembang terhadapnya.

Bab V memberikan garis besar proposal pembaruan sistem perdagangan internasional yang harus diadopsi dalam putaran pembangunan. Budaya akademis mengenai analisis ekonomi dan pengalaman empiris dari negara-negara dalam pembangunan harus dipacu sebagai basis pengambilan keputusan. Kajian imparial mengenai efek dari inisiatif pembangunan yang dilakukan di berbagai negara harus dipublikasikan ke seluruh negara anggota. Dalam hal ini Sekretariat WTO ditantang untuk menunjukkan perannya. Agaknya Stiglitz dan Charlton mengkritik arah ideologi pembangunan yang mendasari sistem perdagangan internasional hanya berlandaskan pengalaman beberapa negara (maju) saja dan selebihnya didasarkan pada asumsi-asumsi hipotesis yang berfungsi sebagai justifikasi ideologis. Keadilan *de jure* dan *de facto*, itulah istilah yang dipakai oleh penulis untuk menggambarkan hal ini.

Berdasarkan hal demikian, Bab VI dimaksudkan untuk memberikan rumusan konsep *special and differential treatment* (perlakuan khusus dan berbeda) bagi negara berkembang untuk memberikan waktu bagi negara tersebut menyesuaikan sistem perdagangan yang baru. Liberalisasi mengakibatkan perubahan

sistem yang membutuhkan biaya besar, apalagi dengan institusi yang masih lemah di negara berkembang.

Pada bab selanjutnya (VII-X) diberikan prioritas agenda pembangunan berbasis teori yang telah dijabarkan sebelumnya. Berbagai kepentingan negara berkembang harus dijadikan prioritas, termasuk pertanian, industri padat karya (seperti tekstil dan pengolahan makanan), dan jasa tenaga tak terlatih (seperti jasa maritim dan konstruksi), dan buruh migran. Setelah membahas mengenai gagasan reformasi institusi pada Bab XII yang menyangkut demokratisasi dan transparansi pengambilan keputusan, buku ini ditutup dengan pembahasan menyangkut biaya penyesuaian (*adjustment cost*). Liberalisasi memang membutuhkan biaya, terutama bagi negara berkembang. Namun biaya tersebut harus dikelola agar dapat dikompensasikan dari manfaat yang diperoleh dari keuntungan liberalisasi. Pada akhirnya, Penulis mengajak seluruh masyarakat internasional untuk memberikan komitmen bersamanya dalam mempromosikan pembangunan di seluruh dunia. Keadilan global bagi semua adalah tujuan akhir dari kerjasama internasional di era milenium ketiga. Perdagangan adalah salah satu caranya, jika dikelola dengan tepat.

(M. Ajisatria Suleiman)